

**UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN MENUJU PERTANIAN
TANGGUH DAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT, JAMBI**

*EFFORT TO INCREASE PRODUCTION OF FOOD TOWARDS FIRM AND
SUSTAINABLE AGRICULTURE IN THE DISTRICT TANJUNG JABUNG BARAT,
JAMBI*

Sumarwoto^{*)}

^{*)}Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Yogyakarta
Sumarwoto.ps@gmail.com

ABSTRACT

Food is primary needs and necessary, because it concerns the needs and livelihood of many people. Especially relating to the availability and food security which is an access to adequate food, safe and affordable to live decent, unmet needs and have a healthy body. Indonesia's society has a high rate of dependance toward rice in daily life needs (139.5 kg / capita / year), so the result of national food security becomes very brittle. This requires efforts to increase food production, in order to reach firm and sustainable agricultural condition among the states. District of Tanjung Jabung Barat is the second level regions that relatively new. Its capital city is Kuala Tungkal with an area of 550.350 ha. This region consists of 13 districts and 52 villages with a potential land for paddy area of 24,505 ha which has relatively low productivity as an average of only 3.93 tons per ha. Based on the results of surveys and through focus group discussions in 13 districts can be elaborated that to achieve a strong agriculture and sustained efforts are needed to increase food production and productivity through the program extensification, intensification and organic-based land rehabilitation. Extensification program pursued through the addition of the planting area by optimizing the previously unproductive land into productive one, in other words, by land arrangements. Moreover, the intensification is done through the program of increasing planting index by Gertak Paduka, organic-based balanced use of fertilizers, improved the quantity and quality of the extension as a companion crop farmers in the implementation and use of alsintan at harvest and post harvest. This program is technically met through donations saprotan as a means to accelerate the cultivation of land, post-harvest and water pumps, also assistance of seed production facilities such as seeds, fertilizers, and insecticides. Furthermore, land rehabilitation is applied by improving soil fertility through the use of organic materials which are available on site and wise plant cultivation system settings.

Key words: *Tanjun Jabung Barat, food, firm agriculture, Gertak Paduka*

INTISARI

Pangan merupakan suatu kebutuhan pokok dan sesuatu hal yang sangat penting, karena menyangkut kebutuhan dan hajat hidup orang banyak. Apalagi yang berkaitan dengan ketersediaan dan ketahanan pangan yang merupakan suatu akses terhadap kecukupan pangan, aman dan terjangkau untuk hidup layak, terpenuhi kebutuhannya dan memiliki tubuh yang sehat. Penduduk Indonesia dalam keseharian hidupnya kebutuhan dan ketergantungan akan beras masih sangat besar (139,5 kg/kapita/tahun), sehingga berakibat terhadap ketahanan pangan nasional menjadi sangat rapuh. Untuk itu diperlukan upaya peningkatan produksi pangan, sehingga dapat membawa daerah berada pada kondisi pertanian yang tangguh dan dapat berkelanjutan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah tingkat II yang relatif baru ber-ibu kota di Kuala Tungkal dengan luas 550.350 ha, yang terdiri atas 13 kecamatan dan 52 desa dengan memiliki lahan potensial untuk tanaman padi sawah dan padi ladang seluas 24.505 ha yang produktivitasnya masih relatif rendah yaitu rata-rata hanya 3,93 ton per ha. Berdasarkan hasil survey dan melalui *Focus Group Discussion* pada 13 kecamatan dapat diketahui, bahwa untuk mencapai bidang pertanian yang tangguh dan berkelanjutan diperlukan upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangannya melalui program ekstensifikasi, intensifikasi yang berbasis organik dan rehabilitasi lahan. Program ekstensifikasi ditempuh melalui penambahan areal tanam dengan mengoptimalkan lahan yang semula tidak produktif menjadi produktif (penataan lahan). Adapun intensifikasi antara lain dilakukan melalui program peningkatan Indek Pertanaman dengan *Gertak Paduka*, penggunaan pupuk berimbang berbasis organik, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh sebagai pendamping petani dalam pelaksanaan budidaya tanaman, serta penggunaan alsintan saat panen dan pasca panen. Program ini secara teknis dipenuhi melalui bantuan berupa saprotan sebagai sarana untuk percepatan pengolahan tanah, pasca panen dan pompa air, serta bantuan sarana produksi berupa benih, pupuk, dan obat-obatan. Adapun rehabilitasi lahan dilakukan melalui perbaikan kesuburan lahan melalui pemanfaatan bahan-bahan organik yang tersedia di tempat dan pengaturan sistem budidaya tanaman yang diusahakan secara arif.

Kata-kata kunci: Tanjung Jabung Barat, pangan, pertanian tangguh, gertak paduka

PENDAHULUAN

Pangan merupakan suatu kebutuhan pokok dan sesuatu hal yang sangat penting karena menyangkut kebutuhan dan hajat hidup orang banyak, oleh karena itu diprioritaskan di dalam pembangunan nasional. Apalagi yang berkaitan dengan ketersediaan dan ketahanan pangan yang merupakan suatu akses terhadap kecukupan pangan, yang aman dan terjangkau untuk hidup layak, terpenuhi kebutuhannya dan memiliki tubuh yang sehat. Penduduk Indonesia dalam

keseharian hidupnya kebutuhan dan ketergantungan akan beras masih sangat besar (139,5 kg/kapita/tahun) (Suryana, 2010), sehingga berakibat terhadap ketahanan pangan nasional menjadi sangat rapuh. Untuk menuju pada pertanian yang tangguh, perlu memperhatikan keterpaduan semua sektor mulai dari tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan serta perikanan kelautan, sehingga tidak tumpang tindih namun saling melengkapi. Pembangunan pertanian harus diarahkan dalam rangka mengupayakan tetap terjaganya ketahanan pangan masyarakat sekaligus dapat mengembangkan usaha agribisnis di masyarakat baik di subsistem hulu (penyediaan *agroinput*), budidaya (*on farm*), hilir (paska panen dan pengolahan) maupun jasa pendukungnya (permodalan, transportasi dan pasar) (Masyhuri, 2007). Agar tercapai tujuan ini, maka harus memperhatikan kondisi dan potensi masing-masing daerah setempat baik dari lahan, hidrologi maupun komoditas yang akan dikembangkan. Dalam upaya mengetahui kondisi dan potensi diperlukan adanya kajian pengembangan pertanian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu dengan adanya penyusunan zone komoditas Pertanian Secara Terpadu.

Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu daerah tingkat II yang relatif masih baru ber-ibu kota di Kuala Tungkal berada dalam wilayah Propinsi Jambi dengan luas 550.350 ha yang terdiri atas 13 kecamatan dan 52 desa. Kabupaten ini memiliki lahan potensial untuk tanaman padi sawah dan padi ladang seluas 24.505 ha yang produktivitasnya masih relatif rendah yaitu rata-rata hanya 3,93 ton per ha.

Untuk itu diperlukan upaya peningkatan produksi pangan, sehingga dapat membawa daerah berada pada kondisi pertanian yang tangguh dan dapat berkelanjutan. Melalui hasil survey dan forum grup diskusi (*FGD*) dari seluruh kecamatan yang ada dapat diketahui, bahwa upaya peningkatan produksi dan produktivitas pangan ditepuh melalui program ekstensifikasi, intensifikasi yang berbasis organik dan rehabilitasi lahan. Program ekstensifikasi ditempuh melalui penambahan areal tanam dengan mengoptimalkan lahan yang semula tidak produktif menjadi produktif (penataan lahan). Adapun intensifikasi antara lain dilakukan melalui program peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dengan Gerakan Serentak Panen Dua Kali (*Gertak Paduka*) dari IP100 menjadi IP 200 bahkan jika mungkin sampai IP 300, penggunaan pupuk berimbang berbasis organik, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh sebagai pendamping petani dalam

pelaksanaan budidaya tanaman, serta penggunaan alsintan saat panen dan pasca panen.

PEMBAHASAN

Pertanian Tangguh dan Berkelanjutan

Pertanian tangguh dan berkelanjutan merupakan kondisi pertanian yang kuat dan lestari dalam hal ketahanan pangan, menopang dan mendukung dalam penyediaan serta pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya secara stabil. Untuk itu dalam implementasinya memerlukan keterpaduan koordinasi di antara aspek pendukungnya, yaitu : (1) sektor usaha agribisnis mulai dari usaha agribisnis hulu, usaha budidaya/usaha tani, hingga usaha agribisnis hilir dan (2) sektor penunjang (sasaran, prasarana dan lingkungan, antara lain : infrastruktur dasar, permodalan, pendidikan, transportasi, kelembagaan dan lain-lain). Disisi lain, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pertanian di Propinsi/Kabupaten memiliki kewenangan yang lebih dominan dalam aspek budidaya/usaha tani, sedangkan aspek hulu dan hilir (sarana, prasarana, pengolahan dan pemasaran) serta aspek penunjang lainnya sangat tergantung pada kebijakan instansi lain. Padahal keterkaitan antar sub sistem tersebut sangat erat, sehingga dalam perencanaan strategis dan operasionalnya diperlukan keterpaduan kebijakan antar berbagai sektor yang terkait. Selain dipengaruhi kebijakan instansi lintas sektoral di Pusat dan Daerah, pengembangan komoditas pertanian juga sangat dipengaruhi oleh respon pelaku usaha petani dan swasta lainnya terhadap kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta partisipasi kelembagaan lain yang terkait dengan pembangunan pertanian seperti : lembaga penggerak swadaya masyarakat, lembaga akademik, media masa, lembaga social budaya serta unsur lain yang terkait, hingga konsumen aneka produk yang dihasilkan dari komoditas tersebut. Kondisi sampai saat ini masih menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan komoditas pertanian cenderung masih berjalan sendiri-sendiri serta kurang terintegrasi dari hulu sampai hilir. Menurut Acemoglu (2003) *dalam* Yustika, A.E. (2006), salah satu cirri kelembagaan yang baik adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap individu untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam bentuk kapasitas individu. Untuk itu keterlibatan dapat dalam bentuk partisipasi individu,

kelompok tani, dan partisipasi kelembagaan baik formal maupun non formal mulai dari tingkat yang paling kecil yaitu rumah tangga.

Sistem pertanian berkelanjutan, merupakan sistem pertanian yang lestari berorientasi pada kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk itu di dalam implementasinya diperlukan sistem pertanian terpadu. Konsep ini perlu mengintegrasikan beberapa unit usaha di bidang pertanian makro (pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan), dikelola secara terpadu dan berorientasi lingkungan, sehingga diperoleh peningkatan nilai ekonomi, tingkat efisiensi dan produktivitas yang tinggi. Konsep pertanian terpadu menganut hukum “ *The Law Of Return*” dimana sebuah komoditas pertanian (misalkan tanaman padi) tidak hanya dipandang sebagai sebuah penghasil pangan (*food*) saja melainkan juga menghasilkan sumberdaya lain yaitu pakan ternak (*feed*). Di samping sebagai penghasil pangan dan pakan, limbah organik pertanian yang tidak dapat dipergunakan sebagai pangan dan pakan diupayakan sedemikian rupa, melalui proses alami, limbah organik dijadikan sebagai pupuk tanah maupun makanan bagi tanaman (*plant nutrien*). Dengan pemanfaatan limbah pertanian (misal jerami) sebagai pakan ternak diharapkan diperoleh hasil samping berupa limbah peternakan (*tletong* dan kencing sapi) yang secara bersamaan diolah dengan limbah pertanian lainnya sehingga menghasilkan pupuk organik yang berdaya guna. Siklus dalam sistem pertanian terpadu ini diharapkan tidak terputus sehingga diperoleh hasil akhir berupa konsep pertanian yang tanpa limbah (*zero waste*), berdampak pada perbaikan lingkungan (ramah lingkungan), hasil yang maksimal dan *marketable* (daya jual) dan pada akhirnya konsep ini dapat mensejahterakan petani khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jikalau konsep ini diterapkan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka sasaran akhirnya adalah terciptanya kemandirian wilayah, hal ini sangat sesuai dengan konsep otonomi daerah.

Untuk mencapai tujuan di atas diperlukan *road map*, yang berisi langkah “strategis dan operasional pengembangan komoditas yang “bertahap dan berkelanjutan”. Hal ini mengandung makna bahwa tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian adalah merupakan suatu langkah yang bersifat strategis, karena memiliki potensi dan prospek pasar

serta memberikan nilai tambah yang luas bagi perekonomian wilayah dan nasional. Namun *road map* juga berisi langkah operasional yang memiliki kejelasan tujuan dan sasaran yang dapat dicapai, karena terukur dan didukung dengan potensi sumberdaya yang tersedia. Di samping itu *road map* berisikan “sasaran dan kondisi yang akan datang yang diinginkan” dalam pengembangan komoditas unggulan pertanian. Hal ini mengandung arti bahwa tujuan dan sasaran yang akan dicapai harus berorientasi jauh ke masa yang akan datang, karena langkah strategis dan operasional serta sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan komoditas telah dianalisis dan diyakini memiliki jaminan prospek pasar yang menjanjikan.

Agar ketahanan pangan terjaga maka juga diperlukan evaluasi kesesuaian lahan, guna dapat mengidentifikasi dan memetakan komoditas yang sesuai dengan tingkat kesuburan yang ada. Evaluasi lahan pada hakekatnya merupakan proses untuk menduga potensi sumberdaya lahan untuk berbagai penggunaan (Sitorus, 1985). Adapun kerangka dasar dari evaluasi sumberdaya lahan adalah membandingkan persyaratan yang diperlukan untuk suatu penggunaan lahan tertentu dengan sifat sumberdaya yang ada pada lahan tersebut sehingga dapat memberikan perbandingan dan alternatif pilihan penggunaan lahan yang diharapkan dapat berhasil. Menurut Dent dan Young (1981) dalam Senawi (1999), inti dari evaluasi lahan adalah membandingkan antara kebutuhan dari berbagai jenis penggunaan lahan yang berbeda-beda dengan kualitas lahan. Lebih lanjut dijelaskan kualitas lahan adalah suatu atribut lahan yang kompleks dan berpengaruh secara langsung kepada kecocokan lahan bagi penggunaan yang spesifik. Oleh karena itu pada evaluasi lahan ini dibutuhkan keterangan-keterangan tentang lahan tersebut yang menyangkut berbagai aspek yang sesuai dengan rencana peruntukannya yang sedang dipertimbangkan (Senawi, 1999). Evaluasi kesesuaian lahan berbeda dengan evaluasi kemampuan lahan. Evaluasi lahan pada umumnya ditujukan untuk penggunaan yang lebih umum yaitu : untuk pertanian, perkotaan, kehutanan, agroforestry, atau penggunaan lahan lainnya. (FAO, 1976 dalam Sitorus, 1985). Oleh sebab itu sifat dari evaluasi kemampuan lahan ini lebih umum dibandingkan dengan evaluasi kesesuaian lahan yang bersifat lebih khusus.

Tipologi Wilayah Usaha Pertanian

Tipologi wilayah usaha pertanian dikelompokkan menjadi tiga tipe wilayah yaitu tipe basah, tipe antara rawa dan pasang surut, serta tipe kering. Tipe basah berupa wilayah rawa yang airnya kadang pasang surut berada di daerah yang topografinya rendah, sedangkan untuk tipe yang kedua adalah wilayah lahannya relatif datar terletak antara rawa dan pasang surut. Tipe kering merupakan wilayah lahan kering yang topografinya bergelombang dan relatif lebih tinggi, keberadaan airnya tergantung dari air hujan. Berdasarkan pengembangan lahan kawasan bidang pertanian, secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Wilayah Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Basah

Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah berupa rawa, merupakan kawasan yang topografinya rendah dan relatif datar diperuntukkan bagi Budidaya Pertanian Lahan Basah yang pengairannya diperoleh secara alamiah yaitu dari rawa, dan tambahan dari air laut yang pasang. Kawasan ini berada di sebagian Kecamatan Pengabuan, Senyerang, Tungkal Ilir, Bram Itam, Sebrang Kota, Betara, dan Kuala Betara.

Kebijakan pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Basah diarahkan pada :

- a. intensifikasi dan ekstensifikasi budidaya Pertanian Lahan basah
- b. peningkatan prasarana dan saluran irigasi pertanian, disertai pemeliharaan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya serta pengendalian kegiatan lain agar tidak mengganggu lahan-lahan pertanian yang subur.

Wilayah ini merupakan wilayah khusus yang potensial untuk pengembangan pangan khususnya komoditas padi sawah.

2. Wilayah pengembangan Kawasan antara rawa dan lahan pasang surut

Kawasan Pertanian antara rawa dan lahan pasang surut, merupakan lahan yang letaknya di kawasan yang topografinya juga relatif datar dan diperuntukkan untuk pengembangan pangan berupa tanaman palawija. Budidaya Pertanian di lahan yang letaknya antara rawa dan lahan pasang surut ini mendapatkan air akibat dari pasang air laut, dan berkurang airnya akibat air laut surut. Kawasan ini keberadaannya tidak dapat disebutkan secara spesifik pada semua wilayah

kecamatan, karena sifat keberadaan hanya pada sebagian wilayah kecamatan yang berdekatan dengan pantai.

3. Wilayah Pengembangan Kawasan Pertanian Lahan Kering

Kawasan Pertanian Lahan Kering adalah kawasan yang diperuntukkan bagi Budidaya Pertanian Lahan Kering yang pengairannya diperoleh secara alamiah berupa tadah hujan. Kawasan ini umumnya berada pada topografi yang lebih tinggi dan bergelombang, dan berada di sebagian Kecamatan Tungkal Ulu, Merlung, Batang Asam, Tebing Tinggi, Renah Mendaluh dan Muara Papalik. Kebijakan pemanfaatan Kawasan Pertanian Lahan Kering diarahkan pada :

- a. peningkatan produktifitas hasil budidaya Pertanian Lahan Kering
- b. pengarahannya daerah potensial yang sesuai bagi pengembangan kawasan pertanian lahan kering dan konservasi lahan kritis dengan kegiatan budidaya pertanian lahan kering.

Adapun komoditas yang dikembangkan pada wilayah ini pada umumnya berupa tanaman industri dan perkebunan, serta tanaman-tanaman hortikultura khususnya tanaman sayur dan buah. Sampai saat ini pengembangan tanaman hortikultura belum berkembang seperti yang diharapkan, karena oleh masyarakat dirasakan masih lebih menguntungkan untuk pengembangan komoditas tanaman industri dan perkebunan.

Upaya Peningkatan Produksi Pangan

Ketahanan pangan perlu diawali pada tingkat rumah tangga, sehingga tercapai ketersediaan pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau serta terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan. Untuk menjadi pertanian yang tangguh, maka perlu diikuti dengan upaya peningkatan produksi pangan melalui peningkatan ekstensifikasi, intensifikasi, dan rehabilitasi lahan. Ekstensifikasi berupa penambahan areal tanam yang dilakukan melalui perluasan areal tanam namun ke depan tampaknya mengalami hambatan untuk berkembang, sehingga ditempuh melalui peningkatan indeks pertanaman (IP) yang secara teknis dapat dilaksanakan. Usaha meningkatkan pertanaman padi yang semula hanya 1 X (IP 100) menjadi 2 X (IP 200) bahkan 3 X (IP 300) se tahun pada lahan yang sama sebagai salah bentuk usaha intensifikasi. Pada program intensifikasi, pemerintah

memprogramkan kegiatan penangkaran benih guna mendukung ketersediaan benih padi, dan penyediaan sarana dan prasarana pertanian guna mendukung tercapainya kelancaran dalam penanganan panen dan pasca panen.

Agar tercapai hasilnya, maka usaha intensifikasi ini diperlukan pendampingan melalui penyuluhan dan pembinaan petani oleh aparaturnya terkait (jumlah dan kualitas penyuluh) serta secara teknis diperlukan bantuan berupa:

1. Penataan lahan (tata air mikro (TAM), optimasi lahan dan reklamasi lahan)
2. Saprotan (untuk percepatan pengolahan tanah, pasca panen dan pompa air)
3. Bantuan sarana produksi (benih varietas unggul baru, pupuk, dan pestisida)

Kiat yang dilakukan adalah dengan mencanangkan slogan ke pelosok wilayah melalui Program *Gertak Paduka* (Gerakan Serentak Panen Dua Kali), dan perluasan areal tanam pada lahan yang mempunyai potensi untuk pengembangan. Di samping itu juga perbaikan sistem pembenihan dan penggunaan pupuk berimbang berbasis bahan organik, pengembangan agribisnis hortikultura, rehabilitasi lahan sentra yang sudah ada dan peningkatan penanganan pasca panen pada tanaman hortikultura, peningkatan pelayanan jasa alat-alat/mesin pertanian (alsintan) untuk mempercepat pengolahan tanah hingga panen.

Pada tahun 2011 secara bertahap telah berhasil memperluas areal lahan pertanian masyarakat untuk pengembangan tanaman padi sebesar 400 ha dari rencana 6.229 ha. Perluasan lahan ini, diharapkan dapat meningkatkan lagi hasil dari sektor pertanian khususnya padi. Perluasan areal ini diperoleh dari beberapa wilayah Kecamatan yang penambahan luasnya tidak sama, antara lain dari Kecamatan Pengabuan, Betara, Tebing Tinggi, dan Batang Asam. Di samping itu juga dilakukan perluasan lahan untuk tanaman pangan lain berupa jeruk sebesar 100 ha, yang berasal dari Kecamatan Tungkal Ilir, Bram Itam maupun Tebing Tinggi. Dalam pengelolaan tanaman jeruk dilakukan melalui kelompok-kelompok tani yang ada di wilayah yang bersangkutan dengan melalui bimbingan teknis dari pemerintah.

Program ekstensifikasi yang dilakukan pada beberapa kecamatan dan desa diperlukan gerakan serentak tanam padi dua kali (*Gertak Paduka*) untuk tercapainya pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Pertanian yang lestari dan berkelanjutan ini, perlu juga didukung oleh program *Gertak Birahi* (Gerakan

Serentak Pengawinan Lembu) bidang peternakan. Gerakan bidang peternakan ini diharapkan selain menghasilkan daging, dan anakan sapi yang banyak, juga kotoran dan urine yang kelak dapat digunakan untuk pupuk organik yang berfungsi sebagai penstabil kesuburan tanah. Semua bahan organik yang dihasilkan ini kelak akan sangat bermanfaat sebagai rehabilitasi lahan yang akan dikembangkan sebagai penghasil pangan, khususnya padi. Adapun komoditas pangan yang diunggulkan adalah berupa tanaman padi varietas Ciherang, Cisoka, dan IR42, diikuti ubi kayu, jagung dan kedelai, sedangkan hortikultura adalah Nanas varietas Paun. Untuk tanaman perkebunan adalah kelapa sawit, kelapa dalam, karet dan pinang. Adapun komoditas lain seperti kopi, kakao, lada, dan lain-lain jumlahnya relatif kecil.

Dalam upaya dan usaha untuk peningkatan produksi pangan dan menjadikan pertanian tangguh dan berkelanjutan ini, juga menghadapi berbagai masalah dan hambatan, di antaranya: dalam hal percepatan tanam, ketersediaan saprodi, personal penyuluh yang masih kurang, musim yang berubah-ubah, rendahnya SDM petani, kemampuan dalam pengendalian organisme pengganggu, infrastruktur yang berkaitan dengan ketersediaan air irigasi, kemampuan pengaturan air dan penataan lahan, serta alat mesin pertanian yang masih kurang untuk penanganan hasil panen.

Di samping upaya di atas, juga diperlukan pengembangan diversifikasi pangan baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menurut Soetriono, *et al* (2006), melalui diversifikasi pangan horizontal dapat dilakukan melalui penganeekaragaman budidaya pertanian dari jenis potensi tanaman pangan yang ada seperti penanaman singkong, ubi, jagung, uwi, ganyong dll. Adapun diversifikasi vertikal dapat dilakukan melalui penganeekaragaman produk pangan olahan dari bahan dasar yang sama. Misalnya singkong dapat dibuat berbagai jenis produk lain yang nilai ekonominya lebih tinggi seperti: gaplek, tape, keripik, tepung tapioka, biskuit, cake, kue, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Untuk dapat mencapai peningkatan produksi pangan dalam menuju pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, diperlukan upaya-upaya pensuksesan program ekstensifikasi, intensifikasi yang berbasis organik dan rehabilitasi lahan. Di Tanjung Jabung Barat program ekstensifikasi ditempuh melalui penambahan areal tanam dengan mengoptimalkan lahan yang semula tidak produktif menjadi produktif dan memperluas tanam yang sesuai dengan potensi dari kesesuaian lahan yang ada. Program intensifikasi antara lain dilakukan melalui program peningkatan Indek Pertanaman dengan Gerakan Serentak Tanam Padi Dua Kali dalam setahun pada luasan lahan yang sama (*Gertak Paduka*), penggunaan pupuk berimbang berbasis organik, peningkatan kuantitas dan kualitas penyuluh sebagai pendamping petani dalam pelaksanaan budidaya tanaman, serta penggunaan alsintan saat panen dan pasca panen. Adapaun rehabilitasi lahan dilakukan melalui perbaikan kesuburan lahan melalui pemanfaatan bahan-bahan organik yang tersedia di tempat dan pengaturan sistem budidaya tanaman yang dilakukan secara bijak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih Penulis sampaikan kepada Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat atas kepercayaan yang diberikan dan berkenan membiayai dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2010. *Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dalam Angka*.
- Masyhuri, 2007. Revitalisasi Pertanian Untuk Mensejahterakan Petani. *Makalah Seminar* Disampaikan Pada Konperensi Nasional Ke XV Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia.
- Senawi, 1999. *Evaluasi dan Tata Guna Lahan Hutan*. Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta.
- Sitorus, S., 1985. *Evaluasi Sumber Daya Lahan*. Tarsito. Bandung.
- Soetriono, Anik, S. dan Rijanto. 2006. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Bayumedia Publishing. Malang.

- Suryana, A. 2010. Harga gandum terus meningkat, peluang pangan lokal. *Sinar Tani*, Edisi 20-26 Oktober 2010.
- Undang – undang No. 54 Tanggal 4 Oktober 1999, *Tentang pemekaran wilayah kabupaten dalam Provinsi Jambi*
- Yustika, A.E., 2006. *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori dan Strategi*. Bayumedia Publishing, Malang.